

24/1/2024
(Rika)

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BANGETAYU KULON DAN KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Widya Sarah Dewi, Augustin Rina Herawati, Hartuti Purnaweni

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail:
fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Based on Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas (PKP), slums are uninhabitable settlements characterized by irregular buildings, high building density, and substandard building quality and facilities and infrastructure. Based on Semarang Mayor Regulation Number 19 of 2023 concerning the Plan for Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements in 2022-2026, the Government has a target for Semarang City with 0% or zero slum areas.

The problem of slums is not a new problem but has become a classic problem phenomenon both at the global, regional, national and local levels. The evaluation of the KOTAKU program in this study aims to measure the success of the KOTAKU program in reducing slums and achieving the target of a City Without Slums. By conducting periodic evaluations, it can monitor the development of slum conditions and ensure that the arrangement program is running according to the set targets.

The aim of this research is to evaluate the output of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Genuk District and evaluate the outcomes of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Genuk District. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and literature study. The theory used in this research is research by Hariani (2017) and Diana, et al (2022) regarding Evaluation of Output and Outcomes. The results of this research show that the KOTAKU Program has succeeded in increasing public access to information, the program coverage is quite broad, and the frequency of effective implementation. Apart from that, this program has also met community needs in terms of building and improving access to proper infrastructure, increasing community knowledge and skills in terms of understanding and managing the environment better, such as how to care for public facilities that have been built or repaired and maintaining infrastructure. However, based on this, there are still several challenges that need to be overcome, such as budget limitations, uncertain implementation schedules, and the existence of segments of society that are less concerned about program sustainability.

Keywords: Evaluation, Output, Outcomes, Slum-Free City (KOTAKU)

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi adalah proses mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkannya terhadap standar yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui

sejauh mana target telah tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki, melalui evaluasi, kita bisa menilai efektivitas suatu kegiatan dan mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan (Umar, 2005).

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Program KOTAKU telah mengurangi area kumuh di beberapa daerah prioritas penanganan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, program penanganan ini hanya berfokus pada penanganan fisik dan belum ada inovasi penanganan yang berkelanjutan. Hal ini tidak sesuai dengan target ke-11 SDG yaitu "Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang ke perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan meningkatkan kawasan kumuh" (UN-Habitat, 2016 dalam Alamsyah dkk, 2021).

Permasalahan kawasan kumuh merupakan fenomena umum di kota-kota besar dunia, termasuk di Kota Semarang, Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kondisi kumuh yaitu upaya meningkatkan derajat kualitas perumahan serta permukiman kumuh guna mempertinggi mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Berdasarkan data sikaper disperakim jatengprov pada tahun 2024 kawasan kumuh pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, Kota Semarang berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Sukoharjo, luas kumuh awal 304.259 Ha turun menjadi 158.661 Ha dengan Jumlah Lokasi / Kawasan Kumuh 33 menjadi 16 lokasi yang meliputi 7 kecamatan, yaitu : Tugu, Tembalang, Semarang Tengah, Genuk, Gunung Pati dan Genuk.

Menurut SK Walikota Semarang Nomor 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang sebagai acuan dalam pelaksanaan Program KOTAKU

dengan Kecamatan Genuk menjadi wilayah prioritas pengelolaan wilayah banjir. Hal tersebut mengingat bahwa pada Tahun 2023 dan 2024 banjir yang terjadi di Kecamatan Genuk cukup tinggi pada tanggal 15 Maret 2024 dan 01 Desember 2024 wilayah Kecamatan Genuk masih mengalami banjir yang cukup parah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 terdapat skala prioritas dalam rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan salah satunya adalah Kawasan Banjardowo (Kecamatan Genuk).

Berikut merupakan Kawasan kumuh di Kecamatan Genuk, yaitu :

Tabel 1
Kecamatan Genuk
Kawasan Kumuh Paling Rendah

NAMA LOKASI	LUAS (HA)
BANGETAYU KULON	1,5
BANGETAYU WETAN	8,35
KARANGROTO	5,05
KUDU	6,4
BANJARDOWO	28,15

Sumber : Perwal No. 19 Tahun 2023, diakses pada bulan Agustus 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Kawasan Kumuh di Kecamatan Genuk merupakan Kawasan penanganan kumuh Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026, dengan target Kota Semarang 0% atau zero kawasan kumuh.

Penelitian terdahulu oleh Sitorus, dkk (2020) menyatakan bahwa di Kelurahan Tanjung Mas terdapat jalan setapak yang rusak seluas 4.958,93 m², dan jalan lingkungan yang rusak seluas 12.174 m², saluran drainase mengalami kerusakan dan menurunnya kapasitas yang disebabkan oleh sedimentasi, sampah, bangunan liar, dan rob, dan masih terdapat 116 KK yang menggunakan MCK

bersama. Hasil penelitian tersebut menjadi contoh bahwa permukiman kumuh di Kota Semarang bercirikan jalan yang rusak, permasalahan saluran drainase dan sampah serta juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan MCK bersama.

Hasil penelitian yang dilakukan Kiswoyo, dkk pada tahun 2023 menunjukkan proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dianalisis dari aspek *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust buildings* (membangun kepercayaan), dan *commitment to process* (komitmen untuk berproses) belum optimal, serta aspek *shared understanding* (berbagi pemahaman) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) sudah berjalan baik. Selain itu, juga ditemukan faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu faktor kepentingan pemerintah, struktur sosial, kultural/kebiasaan, dan bencana alam dengan demikian, penanganan kawasan kumuh tidak mudah dilakukan.

Evaluasi program KOTAKU dalam penelitian ini bermaksud untuk mengukur keberhasilan program KOTAKU dalam mengurangi permukiman kumuh serta mencapai target Kota Tanpa Kumuh. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, maka dapat memantau perkembangan kondisi permukiman kumuh dan memastikan bahwa program penataan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengambil judul **Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana capaian *output* dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo?
2. Bagaimana capaian *outcomes* dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi output Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.
2. Mengevaluasi outcome Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3), administrasi publik merupakan upaya dalam pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan berdasarkan koordinasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk dari koordinasinya sendiri tersusun atas formulasi, implementasi, dan pengelolaan (*manage*) atas segala kebijakan yang ditujukan untuk publik.

2. Model Evaluasi Sistem Analisis

Model evaluasi ini memiliki 5 (lima) jenis evaluasi, yaitu sebagai berikut (Wirawan, 2016):

a. Evaluasi masukan (*input evaluation*).

Mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan.

b. Evaluasi proses (*process evaluation*).

Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki.

c. Evaluasi keluaran (*output evaluation*).

Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran daripada program, yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan berapa baik produk dari program.

d. Evaluasi akibat (*outcome evaluation*).

Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program mengalami perubahan

e. Evaluasi pengaruh (*impact evaluation*)

Evaluasi yang menilai perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dan para pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi program dalam jangka panjang

Menurut Purwanto, dkk (dalam Hariani, 2017) terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai kualitas output, yaitu:

a. Akses

Aspek dalam akses digunakan untuk menentukan tingkat keterjangkauan program oleh kelompok sarasannya. Akses dalam konteks ini merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk berinteraksi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

b. Cakupan

Cakupan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kelompok sasaran tertentu telah terjangkau oleh pelaksanaan program. Terdapat dua langkah dalam prosedur pengukuran cakupan, antara lain: mengidentifikasi siapa yang menjadi kelompok sasaran, dan membandingkan jumlah anggota kelompok sasaran yang telah menerima layanan dengan jumlah total anggota kelompok yang menjadi target.

c. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok sasaran menerima pelayanan dari program. Frekuensi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah frekuensi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pelaksana dan penanggungjawab.

d. Bias

Bias digunakan untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan atau program tersebut cenderung menyasar kelompok masyarakat yang bukan bagian dari sasaran yang seharusnya.

e. Ketepatan layanan

Ketepatan layanan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan atau program dilakukan dengan akurat atau tidak. Jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan program apakah akan berpotensi menyebabkan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

f. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengevaluasi sejauh mana para pelaksana program ini menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab.

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh kelompok sasaran. Selain itu, aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Menurut Purwanto, dkk (2015: 107) terdapat beberapa tahap dalam penilaian policy outcome, yaitu *initial outcomes*, *intermediate outcomes*, dan *longterm outcomes*. Penelitian ini menggunakan tahap *short outcomes* karena program KOTAKU di Kota Semarang selesai pada bulan Juni 2023.

Initial Outcomes/Short Outcomes

Outcomes policy dapat dinilai dari akibat langsung yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka waktu pendek yaitu 1-3 tahun. Tahap ini meliputi :

a. Knowledge (Pengetahuan),

Pengetahuan dalam evaluasi output memiliki arti segala sesuatu yang diketahui atau informasi baru yang diterima oleh kelompok sasaran selama program berlangsung.

b. Attitudes (sikap)

Sikap dalam evaluasi output memiliki arti perilaku yang tercipta oleh kelompok sasaran setelah menerima program.

c. Skill (Keterampilan)

Keterampilan dalam evaluasi output memiliki arti keterampilan yang dimiliki oleh kelompok sasaran setelah menerima bantuan program

d. Aspirations (Aspirasi)

Aspirasi dalam evaluasi output memiliki arti pendapat atau pemikiran oleh kelompok sasaran pada saat program berlangsung (University of Wisconsin, 2015 dalam Diana, 2022).

3. Program Kotaku

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program nasional yang berfungsi sebagai "platform" untuk menangani masalah kumuh dengan menggabungkan berbagai sumber daya. sumber dana dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kota, dan

kabupaten, donor, perusahaan swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh yang diawasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

4. Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat mencapai kehidupan layak bagi penghuninya. Kumuh mencakup berbagai permasalahan-permasalahan seperti permukiman yang illegal, ketidakterediaan pelayanan infrastruktur dasar sehingga tidak menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. (Wicaksono dalam Nurokhman 2019).

Keberadaan permukiman kumuh seringkali diidentikkan sebagai suatu kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, kepadatan kawasan permukiman padat, kondisi kurang layak, penghuninya merupakan kelas menengah kebawah, berbahaya, tidak aman, kondisi lingkungannya tidak sehat, kotor dan stigma-negative lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Situs Penelitian ini merupakan kawasan kumuh tertinggi dan terendah di Kelurahan yang berada di Kecamatan Genuk. Kawasan kumuh yang paling tinggi diantara kelurahan yang lainnya terdapat Kelurahan Banjardowo dengan luas 32,78 (Ha), jumlah penduduk yang dimiliki sebanyak 2.634 jiwa, dan nilai kekumuhan sebesar 337 (kategori ringan). Subjek Penelitian ini menggunakan teknik *purposive dan snowball sampling*.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data yang berupa rangkaian kata atau frase yang dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian bukan berupa angka-angka. Acuan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui : wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat komponen menurut Miles dan Huberman (2014) yaitu : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian

data, serta Penarikan Kesimpulan. Terakhir, penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Evaluasi *Output*

a. Akses

Hasil wawancara dengan Bappeda mengenai akses program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo bahwa Bappeda hanya bertindak sebagai koordinator antara fasilitator KOTAKU dan masyarakat penerima bantuan. Bappeda memastikan bahwa apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh fasilitator atau BKM, maka Bappeda akan menindaklanjuti masalah tersebut secara langsung sehingga program KOTAKU dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Program KOTAKU, bahwa fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada BKM di masing-masing kelurahan. Pelatihan yang diberikan mencakup pembuatan berkas pelaporan program KOTAKU yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian, serta pelatihan terkait operasional dan prosedur khususnya dalam hal pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, fasilitator juga berupaya mempermudah komunikasi antara BKM dan masyarakat dengan membuat grup *WhatsApp* untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program KOTAKU.

Hasil wawancara yang telah diberikan oleh BKM terkait akses program KOTAKU, mereka melakukan pertemuan di kantor Bappeda dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan di Kelurahan Bangetayu Kulon. Selain itu, BKM juga membahas pemetaan penerima program KOTAKU berdasarkan anggaran yang diterima dari Kementerian PUPR. Setelah mendapatkan anggaran, BKM menyebarluaskan informasi tentang program KOTAKU kepada masyarakat, termasuk melalui akses online seperti : *Instagram* dan *Twitter*. BKM juga siap akan memberikan jawaban dan klarifikasi jika ada pertanyaan dari masyarakat mengenai program tersebut.



Gambar 1 Informasi / Akses Online Program KOTAKU di Kelurahan Banjardowo

Sumber : Instagram @kotaku_semarang, 2024

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek akses program KOTAKU dapat disimpulkan bahwa Informasi mengenai program KOTAKU yang disosialisasikan kepada masyarakat dinilai jelas, akurat, dan mudah dipahami. Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya penyampaian informasi dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengerti isi dan tujuan program.

b. Cakupan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Semarang, Program KOTAKU bertujuan untuk mengurangi pemukiman kumuh dengan fokus pada peningkatan infrastruktur. Penentuan kelompok sasaran dilakukan melalui laporan masyarakat tentang kawasan kumuh yang kemudian disurvei oleh tim yang melibatkan BKM dan RT/RW setempat, setelah melakukan pendataan, tim Bappeda menetapkan skala prioritas berdasarkan urgensi perbaikan dan disesuaikan dengan anggaran yang telah tersedia. Proses ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan program tepat sasaran dan berdampak signifikan dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Semarang.

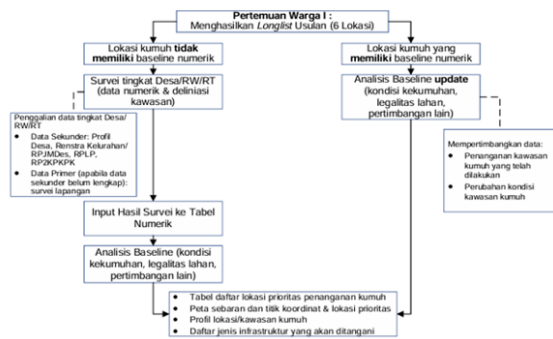
Fasilitator Program KOTAKU mengetakan bahwa Program KOTAKU berasal dari Kementerian PUPR yang berfokus pada penanganan kawasan kumuh. Proses pengumpulan informasi terkait kawasan kumuh dilakukan oleh BKM dan melalui survei langsung ke masyarakat. Setelah itu, Bappeda dilibatkan untuk rapat membahas penentuan

kelompok sasaran yang berhak mendapatkan program KOTAKU tersebut.

Hasil wawancara dengan BKM Kelurahan Bangetayu dan Kelurahan Banjardowo bahwa Program KOTAKU berasal dari Kementerian PUPR, kegiatan program ini dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai pemukiman kumuh dari BKM dan survei langsung ke masyarakat. Setelah itu, pihak BKM diundang untuk mengikuti rapat di Bappeda untuk membahas penentuan kelompok sasaran yang berhak menerima bantuan program tersebut. Menurut BKM Kelurahan Banjardowo bahwa Program KOTAKU dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 terdapat 16 (enam belas) RT/RW yang termasuk dalam kawasan kumuh, namun dalam praktiknya masih terdapat 2 (dua) RT/RW yang belum mendapatkan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, yaitu RT 03/RW IV dan RT 05/RW II.

<p>Gambar 2 Jalan yang belum diperbaiki di Kelurahan Banjardowo</p>	<p>Gambar 3 Sosialisasi Tentang Program KOTAKU di Kelurahan Banjardowo</p>
<p>Gambar 4 Saluran drainase yang masih kumuh di Kelurahan Banjardowo</p>	<p>Gambar 5 Saluran drainase yang sudah diperbaiki di Kelurahan Banjardowo</p>

Sumber : Kelurahan Banjardowo dan dokumentasi penulis



Sumber : Buku saku "Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh, 2024

Gambar 6
Alur proses / tahapan identifikasi dan penilaian Lokasi

Pemerintah melalui berbagai mekanisme memastikan bahwa masyarakat yang menjadi target program KOTAKU benar-benar menerima bantuan yang tepat. Proses ini melibatkan pendataan dan survei daerah kumuh yang dilakukan bersama oleh Tim Fasilitator Pusat, BKM, dan RT/RW. Pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima bantuan agar program dapat terlaksana dengan efektif.

Adapun acuan dalam aspek cakupan ini meliputi :

- Buku Saku "Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh
- Alur proses / tahapan identifikasi dan penilaian lokasi
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 050 / 275 Tahun 2021 tentang Penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2022-2026

c. Frekuensi

Hasil wawancara tersebut menginformasikan bahwa fasilitator program KOTAKU terlibat penuh dalam mendampingi setiap tahap pelaksanaan program KOTAKU, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, mereka juga melakukan pengecekan atau evaluasi setelah program selesai untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan program tersebut.

Wawancara dengan masyarakat mengenai program KOTAKU menunjukkan bahwa tim fasilitator sangat aktif dalam mendampingi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka memberikan pelayanan yang maksimal dalam setiap tahap program. Selain itu, tim fasilitator dan BKM juga secara rutin melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Masyarakat merasa didampingi dan mendapatkan perhatian penuh selama proses program KOTAKU berlangsung.

Kesimpulan dari aspek frekuensi dalam evaluasi dampak program KOTAKU menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator, pemerintah, dan BKM berlangsung secara intensif dan berkesinambungan selama pelaksanaan program. Fasilitator terlibat penuh dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan program hingga program selesai, selain itu mereka juga melakukan pengecekan dan evaluasi setelah program untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan program. Masyarakat juga menginformasikan bahwa tim fasilitator dan BKM selalu mendampingi mereka dan rutin melakukan pengecekan di lapangan serta memastikan bahwa pelayanan yang dijanjikan dalam program KOTAKU dapat terlaksana dengan baik.

d. Bias

Hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan atau bias dalam pencapaian target program KOTAKU. Masyarakat menerima bantuan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun, terdapat keluhan dari sebagian masyarakat terkait wilayah mereka yang tidak mendapatkan anggaran, meskipun program ini telah dijalankan dengan baik di area lainnya.



Gambar 7 Jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki di Kelurahan Bangetayu Kulon	Gambar 8 Jalan yang sudah diperbaiki di Kelurahan Bangetayu Kulon
---	---

Sumber : Dokumentasi penulis

Dari Hasil wawancara dengan Kelurahan Banjardowo menunjukkan bahwa protes dari masyarakat terkait program KOTAKU merupakan hal yang biasa, mengingat semua kawasan yang terlibat dalam program ini memiliki kondisi yang serupa, yaitu kawasan kumuh. Meskipun demikian, pihak kelurahan menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia sudah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga meskipun ada protes, hal tersebut tetap diterima sebagai bagian dari proses implementasi program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan. Berikut merupakan tabel aspek dan kriteria kekumuhan, sebagai berikut :

Tabel 2
Aspek dan Kriteria Kekumuhan

ASPEK (7)	KRITERIA (16)
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat Kepadatan Bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	Ketidaksediaan Drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Buku Saku "Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh

Kesimpulan dari aspek bias dalam evaluasi program KOTAKU menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan program di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Di Kelurahan Bangetayu Kulon, masyarakat merasa bantuan yang diterima sesuai dengan target dan sasaran, meskipun terdapat keluhan dari beberapa pihak yang merasa wilayah mereka tidak mendapatkan anggaran dan program berjalan baik di wilayah lainnya.

Sementara itu, di Kelurahan Banjardowo meskipun terdapat protes dari masyarakat mengenai anggaran, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari proses karena seluruh kawasan yang terlibat memiliki kondisi serupa, yaitu kawasan kumuh. Pihak kelurahan juga mengungkapkan bahwa anggaran yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga meskipun ada ketidakpuasan, protes tersebut diterima sebagai bagian dari implementasi program. Secara keseluruhan, tidak ditemukan penyimpangan atau bias dalam pencapaian target program KOTAKU dalam aspek bias ini.

e. Ketepatan Layanan

Hasil wawancara dengan fasilitator KOTAKU, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU telah berjalan dengan tepat sesuai dengan rencana. Ketepatan pelayanan terhadap program, baik dalam hal

pelaksanaan maupun pemanfaatan, dinilai sudah sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun jadwal pelaksanaannya bervariasi, umumnya dari perencanaan hingga pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 150 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Ketepatan waktu pelaksanaan program KOTAKU yang dilaporkan oleh BKM di kedua kelurahan ini berbeda antara kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Program ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan yang tepat selama proses pelaksanaan memungkinkan tercapainya target dalam waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam penyelesaian program KOTAKU selama ini sudah tepat waktu. Namun, adanya ketentuan biaya tambahan untuk penambahan waktu yang ditanggung oleh masyarakat menunjukkan adanya potensi tantangan dalam hal pembiayaan jika proyek mengalami keterlambatan. Hal ini bisa menjadi perhatian penting dalam evaluasi keberlanjutan program KOTAKU, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Ketepatan waktu yang tercapai dalam kedua kelurahan tersebut menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan program, meskipun perlu ada upaya untuk mengantisipasi risiko yang dapat mempengaruhi anggaran dan waktu yang tersedia.

Hasil wawancara mengenai ketepatan pelayanan program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo dengan informan 3 dan 6 menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Aspek ketepatan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo selama ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, meskipun durasi pelaksanaan di setiap kelurahan berbeda. Di Kelurahan Bangetayu Kulon, pelaksanaan berlangsung sekitar 120 hari kalender, sementara di Kelurahan Banjardowo minimal 45 hari kerja. Masyarakat juga mengonfirmasi bahwa program ini dilaksanakan tepat waktu.

Meskipun demikian, jadwal pelaksanaan program tidak memiliki acuan tetap mengenai berapa hari kerja yang dibutuhkan, sehingga setiap lokasi dapat memiliki durasi yang bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan setempat.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program KOTAKU menunjukkan bahwa program ini telah dikelola secara efektif dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang tepat. Keberhasilan pelaksanaan program dalam waktu yang telah ditentukan menunjukkan kinerja yang baik dan efisien. Jadwal pelaksanaan yang bervariasi tanpa acuan yang pasti dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama jika ada penambahan waktu yang membutuhkan biaya tambahan yang ditanggung oleh masyarakat. Hal ini menjadi tantangan, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya standar waktu yang jelas dan mekanisme yang tepat untuk mengantisipasi risiko keterlambatan agar program dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

f. Kesesuaian program dengan yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan BKM Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Proses pendataan yang dilakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi kawasan yang paling membutuhkan perbaikan memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Hasil implementasi program, seperti perbaikan jalan, pengurangan banjir, dan saluran air menunjukkan bahwa program ini efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan di kedua kelurahan tersebut. Program ini berhasil menciptakan perubahan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga setempat.

Evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo menunjukkan bahwa program ini berhasil

memenuhi kebutuhan masyarakat. Program KOTAKU telah berhasil menangani masalah-masalah prioritas yang dihadapi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan drainase. Hal ini terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap hasil yang dicapai.

Program ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut terlihat bahwa masyarakat turut terlibat dalam proses pembangunan dan perbaikan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka akan tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah sebesar 150 ribu per hari.

Partisipasi aktif ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial, sementara peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi membuka jalan bagi peningkatan taraf hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. Beberapa rumah di wilayah tersebut memang mengalami penyusutan ukuran karena adanya pembenahan infrastruktur, namun masyarakat menerima dengan lapang dada demi tercapainya perbaikan lingkungan yang lebih baik.

g. Akuntabilitas

Kesimpulan dari wawancara mengenai aspek akuntabilitas program KOTAKU menunjukkan bahwa semua pelaksana program menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. BKM memastikan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat pada setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemantauan secara berkala dilakukan dengan pengawasan anggaran yang melibatkan RT/RW. Jika terdapat masalah, BKM mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk mencari solusi.



Sumber : Instagram @kotaku_semarang, 2024

Akuntabilitas pelaksanaan program KOTAKU telah berjalan dengan akuntabel. Semua pihak yang terlibat, terutama BKM, telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program serta pemantauan yang dilakukan secara berkala telah memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Namun, terdapat kekurangan dalam hal transparansi keuangan yang kurang jelas kepada masyarakat, yang menimbulkan beberapa pertanyaan terkait penggunaan dana program. Mekanisme penyelesaian masalah yang melibatkan semua pihak juga menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat program telah terpenuhi.

Hasil Evaluasi *Outcome* Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo dapat disimpulkan bahwa masyarakat mudah mengakses informasi dan tidak ada diskriminasi. Proses penentuan sasaran berjalan lancar, meskipun ada tantangan terkait anggaran dan dua RT/RW di Banjardowo yang belum mendapat anggaran perbaikan. Pendampingan intensif membuat masyarakat puas dan berpartisipasi aktif. Program ini sesuai target dan tidak ada bias, meskipun ada keluhan terkait keterbatasan anggaran dan ketidakpastian

jadwal. Program berhasil memperbaiki infrastruktur, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Akuntabilitas berjalan baik, meskipun ada kekurangan dalam transparansi keuangan. Secara keseluruhan, program ini berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dengan transparansi dan partisipasi yang baik.

Penelitian mengenai Pemukiman Kumuh yang dilakukan oleh Kiswoyo (2023) mengenai proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut, yang dianalisis dari aspek *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), dan *commitment to process* (komitmen untuk berproses), masih belum optimal. Sementara itu, aspek *shared understanding* (berbagi pemahaman) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) telah berjalan dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi, seperti kepentingan pemerintah, struktur sosial, kebiasaan budaya, dan bencana alam.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yustiani, dkk (2021) mengenai Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi di Kota Semarang menunjukkan bahwa Integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kota Semarang berjalan dengan baik. Komunikasi terjalin sejak tahap perencanaan melalui rapat, diskusi, dan pengarahan. Partisipasi masyarakat juga aktif, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi program, menciptakan sinergi antar stakeholder. Namun, model penataan permukiman kumuh di Kota Semarang melalui program KOTAKU tidak dilaksanakan secara menyeluruh, lebih menitikberatkan pada perbaikan sarana dan prasarana. Penataan dilakukan dengan konsep peremajaan, meliputi perombakan rumah dan fasilitas umum, dengan penyediaan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

2. Evaluasi *Outcomes*

a. Pengetahuan

Aspek pengetahuan dalam program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh masyarakat dan BKM sangat penting untuk membantu mereka memahami pelaksanaan program KOTAKU. Berdasarkan wawancara dengan Fasilitator Program KOTAKU, pengetahuan yang diberikan melalui pelatihan meliputi berbagai hal, seperti cara membuat laporan, prosedur operasional, dan pemeliharaan infrastruktur.

Masyarakat juga menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang hal-hal praktis, seperti cara membuat jalan paving dan membangun drainase. Hal ini menunjukkan bahwa program KOTAKU berhasil memberikan informasi dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat yang akan membantu mereka dalam mengelola dan merawat infrastruktur yang dibangun. Dengan adanya pengetahuan ini, masyarakat menjadi lebih siap dan mampu untuk mendukung keberlanjutan program di masa depan.

b. Sikap

Berdasarkan wawancara dengan Fasilitator mengenai sikap masyarakat setelah menerima bantuan program, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menunjukkan dua sikap yang berbeda. Sebagian besar warga sangat berkomitmen untuk menjaga dan merawat bantuan yang diterima, terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam kegiatan gotong royong untuk merawat jalan dan fasilitas umum. Namun, ada juga sebagian warga yang kurang peduli, yang setelah program selesai tidak berusaha untuk menjaga atau merawat fasilitas tersebut dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon mengenai sikap mereka setelah menerima bantuan program, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa bertanggung jawab untuk

menjaga fasilitas yang telah diberikan. Mereka kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat infrastruktur. Banyak di antara mereka yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan, seperti membersihkan saluran drainase dan memperbaiki jalan yang rusak.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Banjardowo mengenai sikap mereka setelah menerima bantuan program, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menunjukkan sikap kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Meskipun program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, beberapa warga tidak berpartisipasi dalam merawat fasilitas yang telah dibangun. Mereka cenderung menganggap bahwa perbaikan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak lain, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Sikap ini menghambat keberhasilan jangka panjang program KOTAKU, karena keberlanjutan hasil program sangat bergantung pada dukungan dan kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan mereka sendiri.

	
<p>Gambar 10 Kerja Bakti di Kelurahan Bangetayu Kulon</p>	<p>Gambar 11 Kerja Bakti di Kelurahan Banjardowo</p>

Sumber : Kelurahan Bangetayukulon dan Banjardowo

Aspek sikap masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo setelah menerima bantuan program KOTAKU menunjukkan dua sikap utama. Sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap positif dengan berkomitmen merawat fasilitas yang dibangun, seperti aktif dalam gotong royong dan pemeliharaan infrastruktur. Namun, ada juga sebagian warga yang kurang peduli dan menganggap perawatan fasilitas adalah tanggung jawab pihak lain, yang menghambat

keberlanjutan program. Sikap negatif ini berpotensi mengurangi keberhasilan jangka panjang KOTAKU, karena pemeliharaan fasilitas bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

c. Keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU telah berhasil meningkatkan kapasitas baik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Banjardowo. Melalui pelatihan yang diberikan, peserta program telah memperoleh keterampilan teknis dalam pelaksanaan proyek fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, mereka juga dibekali dengan keterampilan administrasi yang diperlukan untuk mengelola program, termasuk pembuatan laporan dan pengelolaan anggaran.

Salah satu dampak positif dari program pelatihan KOTAKU adalah peningkatan keterampilan anggota BKM. Melalui pelatihan, anggota BKM telah memperoleh kemampuan dalam menyusun laporan kegiatan, mengelola keuangan, dan menyusun proposal proyek. Keterampilan ini sangat berguna dalam menjalankan kegiatan BKM sehari-hari dan meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan aspek keterampilan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU telah berhasil meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Pelatihan yang diberikan telah membekali peserta dengan berbagai keterampilan, baik teknis maupun administratif. Masyarakat kini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan keuangan, pembuatan laporan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan program KOTAKU untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan proyek-proyek fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan BKM dalam mengelola program

dan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program KOTAKU dalam aspek keterampilan telah berhasil mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat.

d. Aspirasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU telah berhasil menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme dan keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, seperti pembangunan drainase yang memadai untuk mencegah banjir. Partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap program dan hasil pembangunan yang dicapai.

Berdasarkan wawancara dengan BKM di Kelurahan Bangetayu dan Banjardowo, dapat disimpulkan bahwa para pengurus BKM berharap program KOTAKU dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BKM melihat program KOTAKU sebagai upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bangetayu dan Banjardowo, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Masyarakat merasa sangat puas dengan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan, terutama perbaikan jalan yang sebelumnya rusak. Hal ini menunjukkan bahwa program KOTAKU telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur yang layak.

Berdasarkan aspek aspirasi pada penelitian ini bahwa Program KOTAKU telah berhasil menciptakan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide. Hal ini terbukti dari antusiasme masyarakat dalam memberikan masukan, seperti pembangunan drainase yang memadai untuk mencegah banjir. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan adanya rasa memiliki yang tinggi

terhadap program dan hasil pembangunan yang dicapai. Masyarakat merasa bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat berharap program KOTAKU dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas. Mereka juga menginginkan adanya perhatian yang berkelanjutan dari pemerintah untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi outcome pada program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta BKM, yang memungkinkan mereka untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Mayoritas masyarakat berkomitmen merawat fasilitas yang dibangun, meskipun ada segmen yang kurang peduli terhadap keberlanjutan program. Keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas teknis dan pengelolaan keuangan masyarakat, serta menciptakan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan ide-ide mereka.

Dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianingrum dan Djumiarti (2019) yang menunjukkan bahwa program KOTAKU masih mengalami beberapa hambatan seperti, Kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif pada saat proses pendataan kawasan lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya program KOTAKU. Hal ini di dukung dengan kondisi masyarakat di kecamatan Semarang Timur rata – rata berada di bawah garis kemiskinan dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencapaian Evaluasi Output Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo

Hasil Evaluasi Outcome Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan

Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo dapat disimpulkan bahwa evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Banjardowo menunjukkan bahwa masyarakat mudah mengakses informasi dan tidak ada diskriminasi. Proses penentuan sasaran berjalan lancar, meskipun ada tantangan terkait anggaran dan dua RT/RW di Banjardowo yang belum mendapat anggaran perbaikan. Pendampingan intensif membuat masyarakat puas dan berpartisipasi aktif. Program ini sesuai target dan tidak ada bias, meskipun ada keluhan terkait keterbatasan anggaran dan ketidakpastian jadwal. Program berhasil memperbaiki infrastruktur, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Akuntabilitas berjalan baik, meskipun ada kekurangan dalam transparansi keuangan. Secara keseluruhan, program ini berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dengan transparansi dan partisipasi yang baik.

2. Pencapaian Evaluasi Outcome Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi outcome pada program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo bahwa Evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Banjardowo menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta BKM, yang memungkinkan mereka untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Mayoritas masyarakat berkomitmen merawat fasilitas yang dibangun, meskipun ada segmen yang kurang peduli terhadap keberlanjutan program. Keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas teknis dan pengelolaan keuangan masyarakat, serta menciptakan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan ide-ide mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hussein Umar. (2005). *Management and Business Performance*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyasuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Garvamedia
- JURNAL**
- Alamsyah Pratama, M. H. Jamil, A. Roland Barkey. 2021. *Implementation of Sustainable Slum Handling Program (Empirical Study of the KOTAKU Program)*. P-ISSN: 2087-9733 E-ISSN: 2442-983X, Volume 6 No 1, February 2021, 20-27.
- Diana, R. M., & Kismartini, K. (2022). Evaluasi Output dan Outcomes Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 193-211.
- Hariani, N. J. (2017). Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak (Studi Evaluasi Policy Output Dan Policy Outcome Program Expanding Maternal And Neonatal Survival (EMAS) Di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-13.
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 60-73.
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74-94.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026

UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

WEBSITE

<https://sikaper.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan/kabupaten>

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7067523/strategi-menteri-pupr-atasi-banjir-berulang-di-kaligawe-genuk-semarang>

<https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/724443855/update-terbaru-banjir-semarang-jumat-15-maret-2024-wilayah-genuk-masih-parah-gayamsari-dan-pedurungan-berangsur-surut>